

**ANATOMI PRAKTIK *PETTY CORRUPTION* DI LINGKUNGAN SEKOLAH:
DEKONSTRUKSI NORMALISASI KECURANGAN MELALUI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Lutfil Hakim¹, Cecep Dermawan², Ratna Fitria³
^{1,2,3}PPKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

lutfilhkm_04@upi.edu¹, cecepdarmawan@upi.edu², ratna_fitria@upi.edu³

ABSTRACT

Macro level corruption practices are often rooted in the tolerance of normalized micro-scale deviations (petty corruption) during adolescence. This study aims to identify the forms, analyze the causal factors, map the implications, and formulate mitigation strategies for petty corruption through Anti-Corruption Education. Employing a qualitative approach with an embedded single case study design, this research was conducted at SMP Negeri 29 Bandung. Preliminary data from 88 respondents indicated a high prevalence of infractions, dominated by delayed assignment submissions (10.2%), tardiness (9.0%), and financial deceit (7.9%). Subsequent data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The data were analyzed using the analytical frameworks of the Fraud Triangle Theory and the Broken Windows Theory. The findings indicate that rationalization and peer pressure serve as the primary driving forces behind petty corruption. Pedagogical interventions through the exemplary conduct of Pancasila and Civic Education (PPKn) teachers, coupled with the habituation of a climate of integrity, have proven essential in deconstructing corrupt mentalities and restoring the civic disposition of the students.

Keywords: Petty Corruption, Academic Integrity, Fraud Tringle

ABSTRAK

Praktik korupsi secara makro sering kali berakar dari pembiaran terhadap normalisasi penyimpangan berskala mikro (*petty corruption*) di fase remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk, menganalisis faktor penyebab, memetakan implikasi, serta merumuskan strategi penanggulangan *petty corruption* melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terpancang (*embedded single case study*), penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 29 Bandung. Data awal pra-penelitian terhadap 88 responden menunjukkan tingginya prevalensi pelanggaran, di mana keterlambatan pengumpulan tugas (10,2%), keterlambatan masuk kelas (9%), dan manipulasi kebohongan finansial (7,9%) mendominasi perilaku siswa. Pengumpulan data lanjutan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pisau bedah *Fraud Triangle Theory* dan *Broken Windows Theory*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa rasionalisasi dan tekanan teman sebaya (*peer pressure*) menjadi motor

penggerak utama *petty corruption*. Intervensi pedagogis melalui keteladanan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta habituasi iklim integritas terbukti esensial dalam mendekonstruksi mentalitas koruptif dan merestorasi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) peserta didik

Kata Kunci: Korupsi Skala Mikro;Integritas Akademik;Fraud Triangle

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis hukum terkait kerugian finansial negara, melainkan sebuah patologi sosial yang merusak tatanan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Samsuri & Wahidin, 2025). Sering kali, paradigma penanganan korupsi terjebak pada pendekatan represif (*grand corruption*) yang memosisikan korupsi sebagai produk akhir dari sistem orang dewasa yang gagal (Suryani, 2024). Padahal, embrio mentalitas koruptif telah disemai sejak dini melalui fenomena *petty corruption* (korupsi skala kecil) di lingkungan institusi pendidikan tingkat menengah. (Wibowo, 2024)

Dalam realitas pedagogis, tindakan *petty corruption* bermanifestasi sebagai kecurangan-kecurangan mikro yang kerap diremehkan dan dilabeli sebagai "kenakalan remaja biasa". (Santoso & Wahyudi, 2024) Namun, hasil pemetaan data awal (pra-penelitian)

secara daring yang dilakukan pada tanggal 7 April 2026 terhadap 88 peserta didik kelas VII dan VIII di SMP Negeri 29 Bandung memotret realitas krisis integritas yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data tersebut, korupsi waktu dan tanggung jawab akademik menjadi penyimpangan paling dominan, di mana 9 siswa pernah terlambat mengumpulkan tugas meski memiliki banyak waktu, 8 siswa terlambat masuk kelas tanpa alasan, dan 6 siswa menghabiskan waktu ("rebahan") di kelas saat jam kosong.

korupsi finansial dan kecurangan akademik juga terekam jelas. Terdapat 7 siswa yang berbohong meminta uang jajan tambahan dengan dalih kebutuhan penting, 4 siswa memanipulasi pembayaran di kantin, serta praktik kolusi seperti bekerja sama (kode-kodean) saat ulangan (5 siswa) dan menipiskan absensi palsu (5 siswa). Rangkaian angka ini membuktikan bahwa institusi sekolah tengah

berhadapan dengan fenomena *normalization of deviance* (normalisasi penyimpangan). (Transparency International, 2024).

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus *petty corruption* masih didominasi oleh lokus pelayanan publik dan korporasi (Pratama & Hidayat, 2025; Siregar, 2023). Terdapat celah kekosongan (*research gap*) dalam literatur sosiologi pendidikan mengenai bagaimana arsitektur moral pencegahan dibangun untuk memutus mata rantai kecurangan mikro tersebut di sekolah. Mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini hadir untuk membedah anatomi *petty corruption* secara holistik mulai dari jenis, penyebab (*Fraud Triangle*), implikasi (*Broken Windows*), hingga evaluasi efektivitas intervensi Pendidikan Antikorupsi melalui peran guru PPKn di SMP Negeri 29 Bandung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terpancang (*embedded single case study*) (Wijaya, 2025). Lokasi penelitian berpusat di SMP Negeri 29 Bandung.

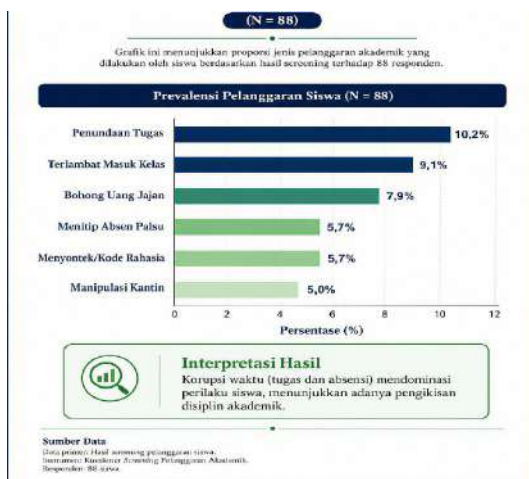
Penelitian ini diawali dengan survei pendahuluan (*screening*) terhadap 88 peserta didik untuk memetakan frekuensi *petty corruption* secara kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, penggalian data mendalam (*in-depth*) dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. (Sudaryono, 2024)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang didukung oleh Guru Bimbingan Konseling (BK), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta perwakilan peserta didik yang terindikasi melalui data awal. Teknik pengumpulan data sirkuler meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif di lingkungan sekolah, dan studi dokumentasi (tata tertib serta jurnal kasus BK). Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil inkuiri lapangan mengonfirmasi bahwa anomali

perilaku yang ditemukan pada 88 responden pra-penelitian terbagi ke dalam tiga dimensi utama korupsi pendidikan. *Pertama*, Korupsi Administratif dan Waktu, yang didominasi oleh penundaan tugas akademik (10,2% responden) dan manipulasi izin kehadiran. *Kedua*, Korupsi Instruksional, terbukti dari adanya praktik menyontek terorganisasi melalui kode rahasia yang dilakukan oleh sebagian kecil siswa namun berdampak luas. *Ketiga*, Korupsi Finansial Mikro, yang termanifestasi pada kebohongan kepada orang tua terkait uang jajan (7,9%) dan ketidakjujuran transaksional (kurang bayar) di kantin sekolah.



Grafik 1. data pelanggar petty corruption

Dimensi Korupsi	Bentuk Pelanggaran (Temuan Dominan)	Jumlah Kasus (n)	Persentase (%)
Korupsi Administratif & Waktu	Penundaan tugas akademik	9	10,2%
	Terlambat masuk kelas tanpa alasan	8	9,1%
	Menitipkan absen palsu	5	5,7%
Korupsi Finansial Mikro	Kebohongan uang jajan ke orang tua	7	7,9%
	Manipulasi bayaran di kantin	4	4,5%
Korupsi Instruksional	Menyontek dengan kode rahasia	5	5,7%
Total		38	43,1%

Sumber: Hasil screening perilaku siswa (N = 88), disolah sendiri.

Catatan: Persentase menunjukkan proporsi siswa yang melakukan masing-masing bentuk pelanggaran. Satu responden dapat melakukan lebih dari satu jenis pelanggaran.

Gambar 1. kategori pelanggar berdasarkan dimensi petty corruption

Anatomi Motivasi Penyimpangan: Analisis *Fraud Triangle*

Mengadopsi teori *Fraud Triangle* dari Donald R. Cressey, kemunculan praktik-praktik di atas tidak berdiri sendiri.

1. Tekanan (*Pressure*):

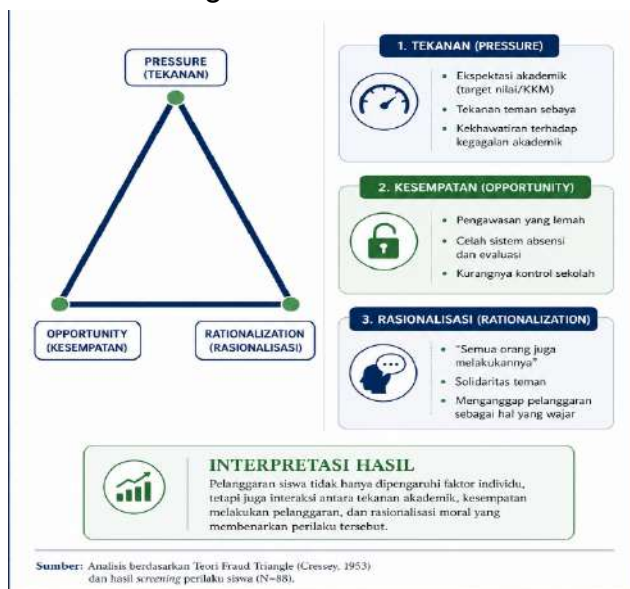
Observasi menunjukkan bahwa tekanan utama bukan berasal dari desakan ekonomi, melainkan ekspektasi akademik (mengejar KKM) dan tekanan teman sebaya (*peer pressure*). Siswa yang menolak memberikan contekan atau menutupi kebohongan temannya rentan menghadapi sanksi sosial berupa pengucilan.

2. Kesempatan (*Opportunity*):

Data awal mengindikasikan bahwa kelengahan sistem pengawasan guru membuka celah penyimpangan, seperti adanya laporan mengenai guru yang datang terlambat (1 siswa) atau guru yang fokus pada gawai saat pembelajaran (3 siswa).

3. Rasionalisasi (*Rationalization*):

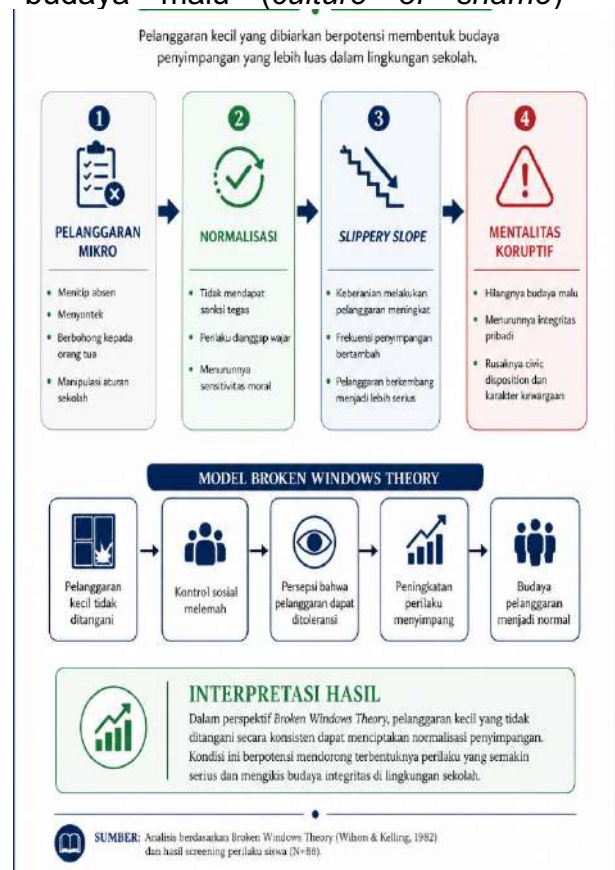
Ini merupakan aspek paling destruktif. Siswa membenarkan tindakan menyontek atau membolos dengan dalih kesetiakawanan



Gambar 2. Motivasi Pelanggaran Petty Corruption

Theory (Wilson & Kelling), ketiadaan respons tegas terhadap indikasi-

indikasi kecil di atas menciptakan iklim sekolah yang permisif. Ketika pelanggaran seperti menitipkan absen (5 kasus) atau berbohong di kantin dibiarkan, hal tersebut memberikan justifikasi psikologis bagi siswa lain untuk meniru (*Slippery Slope Effect*). Pembiaran ini merusak *civic disposition*, di mana siswa kehilangan budaya malu (*culture of shame*)



terhadap tindakan curang.

Gambar 3. Dampak petty corruption terhadap peserta didik

Rekayasa Pedagogis melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK)

Dalam menghadapi krisis integritas mikro ini, intervensi rekayasa pedagogis di SMP Negeri 29

Bandung bertumpu pada dua pilar strategis:

1. Habitulasi Institusional
(Hidden Curriculum):

Pembiasaan nilai tidak lagi direduksi pada hafalan kognitif di kelas. Sekolah menerapkan mekanisme pengawasan melekat dan penguatan budaya integritas secara riil, seperti revitalisasi fungsi kantin sekolah, manajemen absensi presisi, dan konseling nilai berbasis *Moral Feeling* oleh Guru BK.

2. Keteladanan (Role Modeling)
Guru PPKn:

Guru PPKn memegang peranan krusial sebagai arsitek moral. Mengacu pada Teori Perkembangan Moral Kohlberg, remaja usia SMP membutuhkan figur otoritas yang konsisten. Tindakan preventif guru PPKn yang merespons sekecil apa pun ketidakjujuran di kelas dengan sanksi edukatif mampu mendekonstruksi "rasionalisasi" siswa, sehingga mengubah pengetahuan moral (*moral knowing*) menjadi

tindakan etis yang nyata (*moral action*).

D. Kesimpulan

Eskalasi praktik *petty corruption* di jenjang Sekolah Menengah Pertama mewujud dalam bentuk korupsi waktu, manipulasi akademik, dan ketidakjujuran finansial berskala mikro. Fenomena ini didorong oleh tekanan konformitas kelompok, rasionalisasi penyimpangan, serta kelonggaran pengawasan sekolah. Jika dibiarkan, normalisasi kecurangan ini akan menjadi persemaian lahirnya koruptor struktural di masa depan. Oleh karena itu, Pendidikan Antikorupsi (PAK) harus direposisi dari sekadar instrumen tekstual menjadi rekayasa sosial pedagogis. Sinergitas antara keteladanan konsisten pendidik, khususnya guru PPKn, dan habituasi sistemik di sekolah terbukti secara empiris menjadi formula preventif yang efektif untuk merestorasi watak integritas peserta didik secara otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.\nBrabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

Artikel in Press :

Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

Jurnal :

Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 1-3.

Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262 Darmawan, C. (2025). *Membangun ekosistem integritas: pendidikan karakter di era transisi nilai*. Bandung: Refika Aditama.

Nugroho, A. (2024). Integritas Akademik: Membedah Fraud Triangle di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Kontekstual*, 12(2), 45-58.

Pratama, D., & Hidayat, M. (2025). Digitalisasi birokrasi dan pencegahan korupsi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 11(1), 110-125.

Samsuri, & Wahidin, D. (2025). Dekonstruksi civic disposition dan hilangnya budaya malu. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 65-80.

Santoso, B., & Wahyudi, A. (2024). *Psikologi korupsi: Normalisasi kecurangan pada remaja*. Jakarta: Kencana.

Siregar, F. (2023). Gratifikasi dan petty corruption di sektor pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 112-128. (Sesuaikan dengan nama jurnal asli di tabel terdahulu)

Suryani, I. (2024). *Sosiologi korupsi: Anatomi, persepsi, dan pencegahan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Transparency International. (2024).

*Global Corruption Barometer
2024: People and Corruption in
Education Systems.* Berlin:
Transparency International
Press.

Wibowo, A. (2024). *Sosiologi*

*Pendidikan: Membedah
Patologi Sosial di Lingkungan
Sekolah.* Jakarta: Rajawali
Pers.